

SISTEM KERUANGAN WILAYAH DAN PERUBAHAN TINGKAT KEMISKINAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Isma Candra Jati Kusuma

Departemen Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro
candrakusuma@students.undip.ac.id

Diterima: Januari 2022; Disetujui: Mei 2022

Abstract. *The Covid-19 pandemic has caused major shocks, especially to the non-agricultural sector, triggering increased poverty in various regions. An area is composed of urban and rural areas with different characteristics of socio-economic activities. This study aims to analyze the pattern of changes in poverty during the Covid-19 pandemic from the perspective of the regional spatial system. The poverty data used is based on data for the period January and October 2020. The research method used is quantitative analysis with descriptive statistics and spatial analysis. Based on the research results, it is found that urban growth in Sragen Regency tends to be concentrated in the southern area of Bengawan Solo, and the increase in poverty levels in urban areas has a greater tendency than in rural areas. This research is expected to provide knowledge development related to the classification of regional hierarchies, assessment of the distribution of poverty, and the factors that influence poverty vulnerability due to economic shocks.*

Keywords: *poverty, rural, region, spatial system, urban.*

Abstraksi. *Pandemi Covid-19 telah menimbulkan guncangan besar terutama terhadap sektor non-pertanian sehingga memicu terjadinya peningkatan kemiskinan di berbagai wilayah. Suatu wilayah tersusun dari perkotaan dan pedesaan dengan karakteristik aktivitas sosial-ekonomi yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola perubahan kemiskinan di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif sistem keruangan wilayah. Data kemiskinan yang digunakan berdasarkan data periode Januari dan Oktober 2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dengan statistik deskriptif dan analisis spasial. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh temuan bahwa pertumbuhan perkotaan di Kabupaten Sragen cenderung terkonsentrasi pada area selatan Bengawan Solo dan penambahan tingkat kemiskinan di kawasan perkotaan memiliki kecenderungan yang lebih besar dibandingkan dengan kawasan pedesaan. Penelitian ini diharapkan memberikan perkembangan pengetahuan berkaitan dengan klasifikasi hierarki wilayah, penilaian sebaran kemiskinan dan faktor yang berpengaruh terhadap kerentanan kemiskinan akibat guncangan ekonomi.*

Kata kunci: *kemiskinan, pedesaan, perkotaan, sistem keruangan, wilayah.*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan guncangan ekonomi secara global. Perekonomian dunia mengalami kontraksi pada tahun 2020 bahkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 berada 5% di bawah proyeksi awal (World Bank, 2021). Tekanan ekonomi tersebut dirasakan semua sektor terutama sektor non-pertanian. Sektor layanan jasa, manufaktur,

perdagangan (IMF, 2020), travel, wisata, dan ritel (*Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), 2020) merupakan sektor yang terdampak besar akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut mendorong peningkatan kemiskinan hingga 119-124 jiwa (World Bank, 2021). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan yang merupakan salah satu tujuan SDG (*Sustainable*

Development Goals) mengalami tantangan yang besar.

Perkotaan merupakan kawasan dengan intensitas aktivitas non-pertanian yang lebih tinggi. Perkotaan berperan sebagai pusat pelayanan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat (King, 2020) meliputi lingkup internal perkotaan dan kawasan sekitarnya (Shi et al., 2020). Selain itu, beberapa perkotaan saling berinteraksi membentuk suatu sistem hierarki berdasarkan ukuran dan fungsi pelayanannya.

Perkotaan merupakan kawasan dengan konsentrasi aktivitas non-pertanian yang lebih tinggi. Masyarakat non-pertanian memiliki kerentanan yang lebih tinggi di masa pandemi Covid-19 (Ren-fu et al., 2020). Berbagai kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan berdampak terhadap penurunan ketersediaan sumber daya terutama bagi masyarakat non-pertanian. Padahal, penguasaan terhadap sumber daya merupakan faktor utama pendorong kesejahteraan masyarakat (Townsend, 1962). Meskipun dalam kondisi normal, kemiskinan terjadi karena akses yang rendah dan keterisolasian terhadap berbagai fasilitas perkotaan (Chambers, 1995; Liu et al., 2021) tetapi guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 berpotensi mengubah hal tersebut.

Guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 menimpa berbagai wilayah termasuk Kabupaten Sragen. Hal tersebut dapat terlihat pada tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sragen setelah terjadi pandemi Covid-19. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama di Kabupaten Sragen. Kemiskinan di Kabupaten Sragen sampai tahun 2019 mencapai 12,79% sehingga lebih tinggi dibanding rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yaitu 10,80% (BPS Kab Sragen, 2021). Bahkan pada tahun 2020 kemiskinan di Kabupaten Sragen mengalami

peningkatan lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan periode 2018 dan 2019.

Munculnya pandemi Covid-19 merupakan tekanan yang berat bagi masyarakat di Kabupaten Sragen. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sragen mengalami penurunan pada periode tahun 2020, padahal dalam beberapa tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan (BPS Kab Sragen, 2021). Sektor industri dan perdagangan merupakan 2 sektor utama penyumbang PDRB Kabupaten dan mengalami penurunan pada periode tersebut. Kedua sektor tersebut merupakan aktivitas yang memiliki kecenderungan untuk terkonsentrasi pada kawasan perkotaan. Oleh karena itu, terdapat potensi keterkaitan antara keruangan wilayah dan variasi dampak Covid-19.

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 dan kemiskinan. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan penurunan kondisi sosial-ekonomi masyarakat (Fiorella et al., 2021; Mahmud & Riley, 2021), peningkatan jumlah kemiskinan (Ren-fu et al., 2020; Tarigan et al., 2020) dan mekanisme adaptasi yang dilakukan masyarakat menghadapi dampak tersebut (Mahmud & Riley, 2021). Disamping faktor kondisi sosial-ekonomi, kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor geografis yang berkaitan dengan kondisi alam dan lingkungan termasuk fasilitas pendukung aktivitas masyarakat (Liu et al., 2021). Tetapi, penelitian tentang pola perubahan tingkat kemiskinan selama masa Pandemi Covid-19 dalam perspektif sistem keruangan wilayah masih sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola perubahan tingkat kemiskinan di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif sistem keruangan wilayah. Penelitian ini meliputi beberapa tahapan

yaitu mengidentifikasi sistem keruangan wilayah, mengidentifikasi perubahan kemiskinan sebelum dan setelah terjadi pandemi Covid-19 dan perubahan tingkat kemiskinan dan keterkaitannya dengan sistem keruangan wilayah.

Sistem Keruangan Wilayah

Secara umum, sebuah wilayah terdiri dari kawasan perkotaan dan pedesaan. Kawasan perkotaan merupakan pusat berbagai aktivitas dari area yang lebih luas di sekitarnya (Setyono, 2007). Karakteristik perkotaan terlihat dari aspek kependudukan dengan kepadatan yang tinggi dan aktivitas kawasan yang merupakan konsentrasi berbagai fungsi pelayanan perkotaan. Kawasan perkotaan yang telah berkembang maju mempunyai peran yang lebih luas dalam fungsinya sebagai pusat permukiman dan aktivitas masyarakat (Mirsa, 2012). Selain itu, setiap perkotaan juga melakukan interaksi dengan perkotaan lainnya sehingga terbentuk sistem keruangan dan hirarki kawasan dalam wilayah tersebut.

Ada berbagai faktor yang menentukan hirarki wilayah. Hirarki wilayah mempunyai hubungan erat dengan jumlah penduduk pada suatu kawasan (King, 2020). Semakin besar jumlah penduduk pada suatu kawasan, maka nilai minimal dukungan penduduk agar suatu fasilitas dapat tersedia menjadi mudah terpenuhi. Tingkat kelengkapan fasilitas pada suatu kawasan merupakan faktor yang akan menentukan kapasitasnya sebagai tempat pusat pelayanan dan aktivitas masyarakat (Abiodun, 1967). Fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam penentuan orde kawasan adalah fasilitas-fasilitas yang mempunyai nilai tunggal, terukur dan memiliki tingkatan (Apriana & Rudiarto, 2020). Oleh karena itu, jumlah penduduk dan kelengkapan fasilitas pendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat dalam

suatu kawasan merupakan faktor penentu orde kawasan dalam suatu wilayah.

Kemiskinan

Secara umum kemiskinan merupakan kondisi deprivasi kesejahteraan karena ketidakmampuan mencukupi kebutuhan dasar hidup (Haughton & Khandker, 2009). Kemampuan dalam mencukupi kebutuhan dasar tidak dapat dihitung hanya berdasarkan pendekatan moneter, tetapi harus meluas kepada pendekatan kapabilitas masyarakat (Sen, 1999). Pendekatan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal (UNDP, 2006).

Pengukuran kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh beberapa institusi pemerintahan. Salah satu institusi tersebut yaitu Dinas Sosial. Pengukuran kemiskinan oleh Dinas Sosial melibatkan berbagai indikator berbasis pada tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi nasional (TNP2K, 2018). Masyarakat yang memiliki status kesejahteraan sosial-ekonomi pada 40% terendah merupakan kelompok masyarakat dalam Basis Data Terpadu tersebut. Hasil pengukuran dalam Basis Data Terpadu merupakan klasifikasi masyarakat miskin berdasarkan tingkat kesejahteraan nasional ke dalam 4 kategori, yaitu Desil 1 (Sangat Miskin), Desil 2 (Miskin), Desil 3 (Hampir Miskin), dan Desil 4 (Rentan Miskin). Kelompok Desil 1 merupakan masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak mempunyai akses terhadap berbagai pelayanan sosial. Kelompok Desil 2 merupakan masyarakat dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan tetapi memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar. Kelompok Desil 3 merupakan masyarakat yang memiliki pendapatan sedikit di atas

garis kemiskinan, sehingga kelompok ini rentan terhadap guncangan ekonomi dan sosial. Dan Kelompok Desil 4 merupakan masyarakat yang memiliki kehidupan relatif lebih baik tetapi memiliki kerentanan tinggi saat terjadi guncangan ekonomi dan tidak adanya bantuan sosial (Arif et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Kabupaten Sragen merupakan wilayah *hinterland* Perkotaan Subosukawonosraten dan termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sragen berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di sebelah utara, Kabupaten Boyolali di sebelah barat, Kabupaten Karanganyar di sebelah selatan dan Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur) di sebelah timur. Luas Kabupaten Sragen sebesar 941,55 Km², terdiri atas 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan (BPS Kab Sragen, 2021). Secara umum wilayah kabupaten terbagi menjadi 2 kawasan, yaitu kawasan utara dan selatan Sungai Bengawan Solo yang melintang dari barat daya ke timur laut. Pada periode tahun 2020 jumlah penduduknya sebesar 976.951 dengan kepadatan rata-rata penduduk di Kabupaten Sragen mencapai 946 jiwa per Km² c.

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari publikasi instansi pemerintah, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Sragen. Data yang digunakan dalam penelitian ini (Tabel 1) meliputi:

- 1) Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan dari BPS tahun 2010.
- 2) Jumlah penduduk, jumlah fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi tingkat

kecamatan dari BPS Kabupaten Sragen tahun 2021.

- 3) Peta wilayah, peta jaringan jalan arteri dan kolektor, peta lokasi terminal, peta lokasi stasiun dan peta lokasi instansi pemerintah dari Geoportal Bappeda Litbang Kabupaten Sragen tahun 2021.
- 4) Jumlah rumah tangga miskin dari Basis Data Terpadu Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah periode Januari 2020 dan Oktober 2020.

Subyek dalam penelitian ini meliputi 20 kecamatan dan 208 desa di Kabupaten Sragen.

Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif melalui analisis statistik deskriptif dan analisis spasial. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk numerik, tabel dan gambar. Penelitian ini menggunakan 3 tahapan yaitu analisis sistem keruangan meliputi hirarki wilayah, analisis distribusi perubahan tingkat kemiskinan dan terakhir analisis keterkaitan antara sistem keruangan dan perubahan tingkat kemiskinan. Berikut ini tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian:

- 1) Menghitung Hirarki Wilayah dengan Metode *Rank-size-rule*

Rank-size-rule merupakan salah satu metode dalam penilaian hirarki wilayah. Metode tersebut berdasarkan fakta bahwa hirarki perkotaan mempunyai hubungan erat dengan jumlah penduduk pada suatu kawasan (King, 2020). Unit analisis yang digunakan yaitu tingkat kecamatan. Analisis ini digunakan untuk menilai hirarki sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan wilayah. Penghitungan *rank-size-rule* menggunakan persamaan $p_i = k / r_i$, dimana p_i adalah jumlah penduduk orde tertentu, k adalah jumlah penduduk kawasan orde tertinggi dan r adalah orde kawasan.

2) Menghitung Hirarki Wilayah dengan Skalogram

Analisis skalogram digunakan untuk menilai hirarki wilayah dalam perannya sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan. Skalogram Guttman merupakan metode penentuan orde kawasan berdasarkan kelengkapan fasilitas pendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Orde kawasan ditentukan oleh kapasitasnya sebagai tempat pusat pelayanan dan aktivitas masyarakat (Abiodun, 1967). Fasilitas yang digunakan dalam penentuan orde kawasan yaitu fasilitas yang mempunyai nilai tunggal, terukur dan memiliki tingkatan (Apriana & Rudiarto, 2020). Dalam penelitiannya tersebut Apriana & Rudiarto (2020) menggunakan berbagai fasilitas sosial-ekonomi terkait aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain fasilitas-fasilitas tersebut, sarana mobilitas masyarakat merupakan faktor penting dalam penilaian perkembangan kawasan (Anjani & Ma'rif, 2020).

Penghitungan indeks skalogram meliputi beberapa tahapan (Gambar 1). Pertama yaitu identifikasi ketersediaan fasilitas dengan memberikan nilai 1 pada kawasan yang memiliki fasilitas tertentu dan nilai 0 pada kawasan yang tidak memiliki fasilitas tersebut. Tahap kedua yaitu menyusun hasil identifikasi ketersediaan fasilitas tersebut kedalam bentuk horisontal dan vertikal serta dijumlahkan tiap baris dan kolom. Kawasan yang memiliki jumlah kelengkapan fasilitas paling banyak merupakan kawasan dengan orde yang paling tinggi. Tahap ketiga yaitu menguji kelayakan skalogram dengan persamaan $COR = 1 - \frac{a}{b \times c}$, dimana COR adalah koefisien kelayakan, a adalah jumlah kesalahan, b adalah jumlah kawasan, dan c adalah jenis fasilitas yang digunakan dalam

analisis. Koefisien kelayakan yang memenuhi syarat yaitu antara 0.9 – 1.

Tabel 1.

Variabel Analisis Sistem Keruangan dan Tingkat Kemiskinan

Aspek	Variabel	Referensi
Demografi	Jumlah penduduk	King, 2020
Pendidikan	TK, SD, SMP, SMA, SMK, PT	Apriana & Rudiarto, 2020
Kesehatan	Klinik, Puskesmas, RSUD, Apotek	Apriana & Rudiarto, 2020
Ekonomi	Industri, Pasar Kabupaten, Pasar, Bank	Apriana & Rudiarto, 2020
Transportasi	Terminal, stasiun, jalan arteri, jalan kolektor	Anjani & Ma'rif, 2020
Pemerintahan	Instansi tingkat kabupaten	Abiodun, 1967
Sosial Ekonomi	Jumlah masyarakat miskin	Arif et al., 2019

Sumber: Hasil Perspektif Penulis, 2022

3) . Menghitung Pengukuran Perubahan Tingkat Kemiskinan

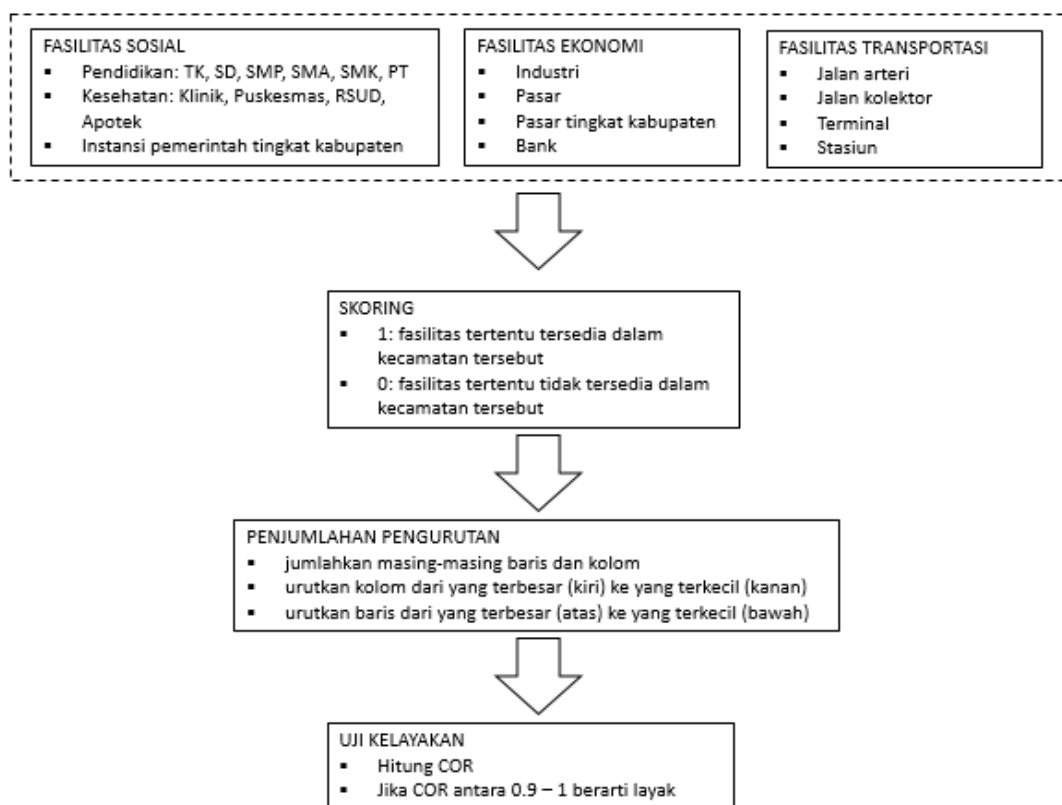
Pengukuran peningkatan kemiskinan dilakukan berdasarkan data jumlah kemiskinan dari Dinas Sosial. Data yang diperoleh merupakan jumlah kemiskinan periode Januari dan Oktober 2020. Data Januari 2020 diambil dengan asumsi merupakan kondisi sebelum terjadi pandemi Covid-19, sedangkan data Oktober 2020 diambil dengan asumsi merupakan kondisi setelah terjadi pandemi Covid-19. Data kemiskinan tersebut terbagi menjadi 4 kelas yaitu Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4. Pengukuran perubahan tingkat kemiskinan dilakukan melalui selisih jumlah kemiskinan pada masing-masing Desil untuk setiap desa/kelurahan di Kabupaten Sragen. Hasil pengukuran yang bernilai positif berarti terjadi penambahan jumlah kemiskinan pada

kawasan tersebut, sedangkan hasil yang bernilai negatif berarti terdapat penurunan jumlah kemiskinan pada kawasan tersebut.

4) Analisis Keterkaitan Sistem Keruangan dan Peningkatan Kemiskinan

Analisis keterkaitan sistem keruangan wilayah dan perubahan tingkat kemiskinan dilakukan melalui penghitungan perubahan tingkat kemiskinan pada masing-masing Desil dan setiap kategori kawasan yaitu

perkotaan dan pedesaan. Hasil perhitungan yang bernilai positif berarti terjadi peningkatan jumlah kemiskinan pada kategori kawasan tersebut, dan hasil yang negatif berarti terdapat penurunan jumlah kemiskinan pada kawasan tersebut. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu mengkomparasi hasil tersebut dengan tingkat orde wilayah di Kabupaten Sragen.



Gambar 1. Metode Skalogram
Sumber: Hasil Perspektif Penulis, 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hirarki Wilayah dengan *Rank-Size-Rule*

Hirarki wilayah merupakan sistem tingkatan kawasan-kawasan dalam sebuah wilayah. Berdasarkan jumlah penduduknya, wilayah Kabupaten Sragen terbagi menjadi 3 kelas (Gambar 2). Kawasan orde tertinggi yaitu Kecamatan Masaran (74.377 jiwa) dan orde terendah yaitu Kecamatan Gesi (19.914 jiwa). Kawasan lainnya, 18 Kecamatan merupakan kawasan orde 2. Oleh karena itu,

berdasarkan jumlah penduduk dalam suatu kawasan, wilayah Kabupaten Sragen memiliki kecenderungan distribusi orde kawasan yang cenderung merata.

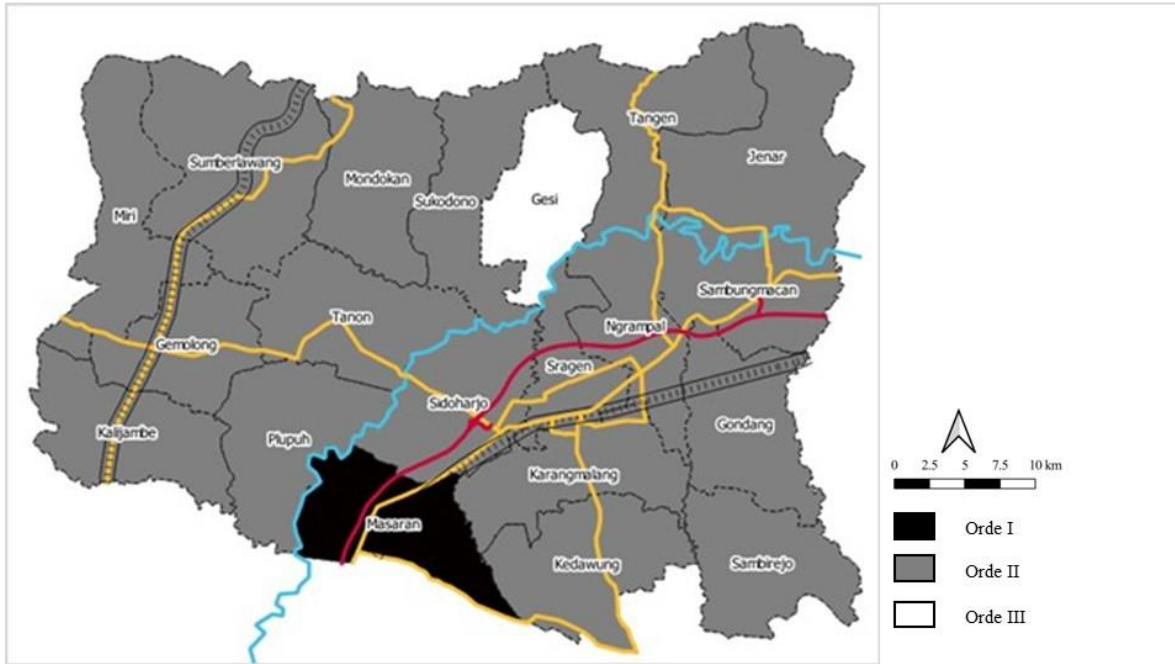
Hirarki Wilayah dengan Skalogram

Selain berdasarkan jumlah penduduk pada suatu kawasan, hirarki wilayah juga dapat dilihat dari kelengkapan fasilitas pendukung aktivitas masyarakat. Perhitungan skalogram dalam penelitian ini

meliputi 18 jenis fasilitas pendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Perhitungan skalogram tersebut menghasilkan COR sebesar 0,9375 sehingga layak digunakan dalam menjelaskan hirarki kawasan di Kabupaten Sragen.

Berdasarkan perhitungan skalogram, Kabupaten Sragen terbagi menjadi 6 orde (Tabel 2 dan Gambar 3). Kecamatan Sragen

merupakan kawasan dengan orde tertinggi, diikuti Kecamatan Gemolong sebagai kawasan orde 2. Delapan belas kecamatan lainnya hanya berada pada orde 4, 5 dan 6 karena tidak ada kawasan yang menempati pada orde 3. Perhitungan skalogram tersebut menunjukkan terjadinya kesenjangan perkembangan di Kabupaten Sragen.



Gambar 2. Hirarki Metode *Rank-size-rule*
Sumber: Hasil analisis, 2022

Tingkat kelengkapan fasilitas-fasilitas pendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat bervariasi. Beberapa fasilitas memiliki ketersediaan kurang dari 50% jumlah kecamatan di Kabupaten Sragen. Fasilitas tersebut meliputi fasilitas pendidikan (Perguruan Tinggi), fasilitas kesehatan (RSU), fasilitas ekonomi (Bank), fasilitas transportasi (terminal dan stasiun), dan fasilitas pemerintahan tingkat kabupaten. Fasilitas-fasilitas lain sudah memiliki tingkat ketersediaan lebih dari 50% jumlah kawasan di Kabupaten Sragen.

Fasilitas pendidikan dan kesehatan dasar di Kabupaten Sragen sudah tersebar dengan baik. Fasilitas pendidikan meliputi tingkat

TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PT. Fasilitas TK hingga SMA sudah tersedia di semua wilayah di Kabupaten Sragen. Fasilitas Perguruan Tinggi hanya terdapat di Kecamatan Sragen. Fasilitas kesehatan meliputi Puskesmas, Apotek, Klinik dan Rumah Sakit Umum. Fasilitas kesehatan Puskesmas, Klinik dan Apotek sudah tersedia pada semua kecamatan, kecuali Kecamatan Sukodono yang belum memiliki Klinik. RSU berada di Kecamatan Sragen, Gemolong dan Masaran. Oleh karena itu, secara umum ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan dasar sudah tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Sragen.

Tabel 2.
Hasil Perhitungan Skalogram

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	P1	P2	P3	K1	K5	E1	E3	P5	K2	P4	T2	T1	E2	T4	K4	K3	P6	U	Jumlah	Order	Error	
1	Sragen	69,406	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	I	0
2	Gemolong	46,960	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	16	II	0
3	Masaran	74,377	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	14	IV	1
4	Gondang	42,202	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	13	V	1
5	Sumberlawang	44,295	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	13	V	1
6	Kalijambe	49,389	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	12	VI	1
7	Ngrampal	37,531	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	12	VI	2
8	Tanon	51,530	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	VI	0
9	Sambungmakan	44,689	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	VI	0
10	Karangmalang	68,016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	VI	0
11	Kedawung	59,902	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11	VI	2
12	Tangen	26,057	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11	VI	2
13	Sambirejo	35,803	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	VI	0
14	Gesi	19,914	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	VI	0
15	Sukodono	29,631	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	VI	2
16	Jenar	26,991	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	VI	1
17	Sidoharjo	51,534	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	VI	1
18	Miri	32,566	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	VI	0
19	Mondokan	33,940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	VI	0
20	Plupuh	43,156	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	VI	1
Jumlah		887,889	20	20	20	20	20	20	20	19	18	14	13	7	6	6	3	2	1	1			15	

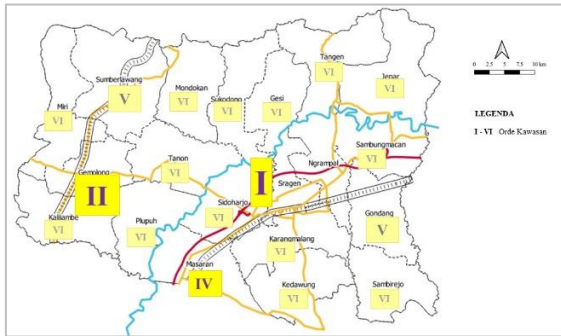
Sumber: Hasil analisis, 2022

Fasilitas ekonomi meliputi pasar, industri dan bank. Semua kawasan sudah memiliki ketersediaan pasar dan industri, meskipun mempunyai skala pelayanan yang berbeda-beda. Fasilitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah terdapat di Kecamatan Sragen, Gemolong, Masaran, Gondang, Kalijambe dan Sukodono. Berdasarkan distribusi tersebut, terdapat beberapa wilayah yang memiliki akses kurang memadai terhadap fasilitas BPD Jateng yaitu sekitar kawasan pinggiran wilayah kabupaten.

Fasilitas transportasi merupakan pendukung utama mobilitas masyarakat. Penilaian skalogram meliputi ketersediaan jalan arteri atau kolektor, terminal dan stasiun KAI. Ketersediaan jalur arteri atau kolektor sudah meliputi 50% jumlah kecamatan di Kabupaten Sragen. Fasilitas

terminal tersedia di Kecamatan Sragen, Gemolong, Gondang, Sumberlawang, Ngrampal, Kedawung dan Tangen. Stasiun KAI terdapat pada beberapa titik yaitu di Kecamatan Sragen, Gemolong, Masaran, Gondang, Sumberlawang, dan Ngrampal.

Hasil temuan tersebut sesuai dengan konsep dasar sebuah wilayah yang terdiri dari beberapa kawasan dengan orde yang berbeda-beda. Kawasan perkotaan berperan sebagai pusat permukiman dengan kelengkapan fasilitas yang lebih baik (Mirsa, 2012). Kawasan dengan orde tinggi, yaitu Kecamatan Sragen dan Kecamatan Gemolong merupakan pusat permukiman yang memiliki tingkat kelengkapan fasilitas pendukung aktivitas sosial ekonomi yang lebih baik.

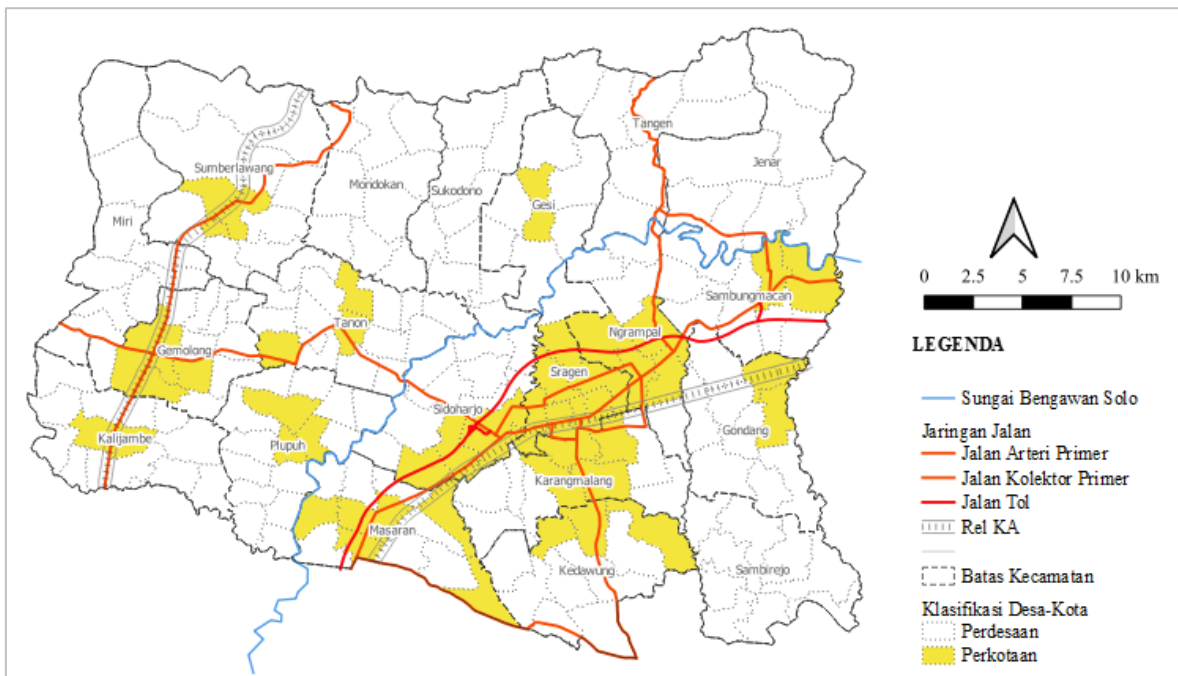


Gambar 3. Hirarki Metode Skalogram
Sumber: Hasil analisis, 2022

Klasifikasi Desa-Kota

Klasifikasi wilayah dalam unit desa/kelurahan dilakukan untuk mengetahui

sebaran kawasan perkotaan dan pedesaan. Hal tersebut dilakukan karena desa/kelurahan merupakan unit administrasi terkecil di Indonesia. Kabupaten Sragen memiliki 48 desa/kelurahan dengan status perkotaan (Gambar 4). Kawasan perkotaan yang berada di sebelah selatan Sungai Bengawan Solo sebanyak 33 desa/kelurahan dan di sebelah utara hanya 15 desa/kelurahan (Tabel 4). Dengan demikian, pertumbuhan wilayah di sebelah selatan Sungai Bengawan Solo cenderung lebih cepat dibandingkan dengan kawasan-kawasan di sebelah utara.



Gambar 4. Klasifikasi Desa Kota

Sumber: Hasil olah data Klasifikasi Desa-Kota BPS 2010, 2022

Perbedaan pertumbuhan kawasan-kawasan tersebut tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas pendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Sebuah kawasan akan mengalami peningkatan pertumbuhan seiring dengan peningkatan fungsinya (Bhatta, 2010). Kawasan selatan Bengawan Solo merupakan lokasi yang lebih dekat dengan ibukota kabupaten sehingga memiliki akses layanan dan pertumbuhan yang lebih baik. Hal tersebut

terjadi karena terdapat beberapa unsur yang berpengaruh terhadap pertumbuhan kawasan yaitu posisi geografis, fungsi kawasan, ketersediaan sarana dan prasarana (Branch, 1995), dan ketersediaan jaringan jalan (Tan, 2014). Selain itu, kawasan dengan orde tertinggi yaitu Kecamatan Sragen (berdasarkan Skalogram) dan Kecamatan Masaran (berdasarkan *rank-size rule*) merupakan wilayah yang berada di selatan Sungai Bengawan Solo (Gambar 2).

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Tisdale (1942) bahwa tingkat urbanisasi dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada suatu wilayah, sehingga wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih besar akan mengalami urbanisasi yang lebih cepat. Pada wilayah utara Sungai Bengawan Solo hanya terdapat Kecamatan Gemolong yang memiliki orde 2 dengan kelengkapan fasilitas cukup baik, sedangkan kecamatan-kecamatan lainnya hanya berada pada orde 5 dan 6. Oleh karena itu, tingkat kelengkapan fasilitas merupakan pendorong dalam perkembangan kawasan menjadi perkotaan.

Perubahan Tingkat Kemiskinan

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan tekanan ekonomi yang besar, sehingga beberapa kelompok masyarakat menderita penurunan kesejahteraan hidupnya. Kerentanan masyarakat terhadap tekanan ekonomi tersebut dapat terlihat pada perubahan angka kemiskinan dalam kawasan atau unit desa/kelurahan. Secara keseluruhan masyarakat miskin meliputi kategori Desil 1 (Sangat Miskin), Desil 2 (Miskin), Desil 3 (Hampir Miskin) dan Desil 4 (Rentan Miskin).

Masing-masing kawasan memiliki karakteristik perubahan kemiskinan yang bervariasi. Kemiskinan keseluruhan di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan sebesar 6.943 rumah tangga. Kawasan yang mengalami peningkatan angka kemiskinan sebesar 141 desa/kelurahan, penurunan kemiskinan sebesar 66 desa/kelurahan dan jumlah kemiskinan tetap sebesar 1 desa/kelurahan. Rata-rata peningkatan jumlah kemiskinan satu kawasan sebesar 64,60 rumah tangga, sedangkan rata-rata penurunan jumlah kemiskinan sebesar -32,82 rumah tangga. Peningkatan kemiskinan tertinggi terjadi di Gemolong, Kecamatan Gemolong sebesar 372 rumah

tangga. Penurunan kemiskinan tertinggi terjadi di Kedawung, Kecamatan Masaran sebesar -175 rumah tangga.

Tabel 3.
Klasifikasi Desa Kota

Kecamatan	Jumlah Desa	Perkot aan	Perdes aan
Sragen	8	7	1
Masaran	13	6	7
Gemolong	14	5	9
Karangmalang	10	4	6
Ngrampal	8	4	4
Sidoarjo	12	4	8
Kedawung	10	3	7
Plupuh	16	3	13
Tanon	16	3	13
Gondang	9	2	7
Kalijambe	14	2	12
Sambungmacan	9	2	7
Sumberlawang	11	2	9
Gesi	7	1	6
Jenar	7	0	7
Miri	10	0	10
Mondokan	9	0	9
Sambirejo	9	0	9
Sukodono	9	0	9
Tangen	7	0	7
Jumlah	208	48	160

Sumber: Hasil Olah Data dari Klasifikasi Desa-Kota BPS 2010, 2022

Masyarakat kategori Desil 1 merupakan kelompok masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan 10% terbawah rata-rata kesejahteraan nasional di Indonesia. Kawasan yang mengalami peningkatan kemiskinan sebesar 126 desa/kelurahan, kemiskinan tetap sebesar 1 desa/kelurahan dan penurunan kemiskinan sebesar 81 desa/kelurahan (Tabel 4). Peningkatan jumlah kemiskinan dalam satu kawasan tertinggi yaitu di Cemeng, Kecamatan Sambungmacan sebesar 183 rumah tangga. Kawasan dengan penurunan kemiskinan terbesar yaitu Banyurip, Kecamatan Jenar sebesar -282 rumah tangga. Meskipun kawasan yang mengalami peningkatan kemiskinan lebih besar, tetapi secara keseluruhan kelompok Desil 1 di Kabupaten

Sragen mengalami penurunan sebesar -2.195 rumah tangga.

Masyarakat kategori Desil 2 merupakan kelompok masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan antara 10% sd 20% rata-rata kesejahteraan nasional terendah di Indonesia. Kawasan yang mengalami peningkatan kemiskinan sebesar 55 desa/kelurahan, kemiskinan tetap sebesar 1 desa/kelurahan dan penurunan kemiskinan

sebesar 152 desa/kelurahan. Peningkatan kemiskinan dalam satu kawasan terbesar yaitu Gemolong, Kecamatan Gemolong sebesar 87 rumah tangga. Kawasan dengan penurunan kemiskinan terbesar yaitu Kedawung, Kecamatan Mondokan sebesar -257 rumah tangga. Secara keseluruhan kelompok Desil 2 di Kabupaten Sragen mengalami penurunan sebesar -7.409 rumah tangga.

Tabel 4.
Perubahan Tingkat Kemiskinan

	Jumlah Desa	Jumlah Rumah Tangga	Rata-Rata	Min	Max
Perubahan Kategori Sangat Miskin					
Bertambah	126	3.749	29,75		83
Tetap	1		0,00		
Berkurang	81	-5.944	-73,38	-282	
Jumlah	208	-2.195			
Perubahan Kategori Miskin					
Bertambah	55	1.385	25,18		87
Tetap	1		0,00		
Berkurang	152	-8.794	-57,86	-257	
Jumlah	208	-7.409			
Perubahan Kategori Hampir Miskin					
Bertambah	60	2.415	40,25		204
Tetap	5		0,00		
Berkurang	143	5.070	-35,45	-121	
Jumlah	208	2.655			
Perubahan Kategori Rentan Miskin					
Bertambah	208	19.202	92,32	8	299
Tetap	0	0	0,00		
Berkurang	0	0	0,00		
Jumlah	208	19.202			

Sumber: Hasil analisis, 2022

Masyarakat kategori Desil 3 merupakan kelompok masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan antara 20% sd 30% rata-rata kesejahteraan nasional terendah di Indonesia. Kawasan yang mengalami peningkatan kemiskinan sebesar 60 desa/kelurahan, kemiskinan tetap sebesar 5 desa/kelurahan dan penurunan sebesar 143 desa/kelurahan. Peningkatan jumlah kemiskinan dalam satu kawasan terbesar

yaitu Banyuurip, Kecamatan Jenar sebesar 204 rumah tangga. Kawasan dengan penurunan kemiskinan terbesar yaitu Mojokerto, Kecamatan Kedawung sebesar -121 rumah tangga. Secara keseluruhan kelompok Desil 3 di Kabupaten Sragen mengalami penurunan sebesar -2.655 rumah tangga.

Masyarakat kategori Desil 4 merupakan kelompok masyarakat yang berada pada

tingkat kesejahteraan antara 30% sd 40% rata-rata kesejahteraan nasional terendah di Indonesia. Seluruh kawasan di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan kemiskinan Desil 4 yaitu 208 desa/kelurahan. Peningkatan kemiskinan dalam satu kawasan terbesar yaitu Ngargosari, Kecamatan Sumberlawang sebesar 299 rumah tangga. Kawasan dengan peningkatan kemiskinan terendah yaitu Pringanom, Kecamatan Masaran sebesar 8 rumah tangga. Secara keseluruhan kelompok Desil 4 di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan sebesar 19.202 rumah tangga.

Secara umum, hasil tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ren-fu et al. (2020) dan Tarigan et al. (2020). Selama masa pandemi Covid-19 terdapat peningkatan jumlah kemiskinan. Penambahan tersebut terutama terjadi pada kelompok masyarakat Sangat Miskin dan Rentan Miskin, tetapi pada kelompok Miskin dan Hampir Miskin justru mengalami penurunan jumlah yang lebih besar dibandingkan penambahannya.

Desa-Kota dan Perubahan Tingkat Kemiskinan

Penilaian perubahan kemiskinan dilakukan berdasarkan klasifikasi kawasan dan jumlah perubahan kemiskinan. Klasifikasi kawasan meliputi kategori desa dan kota, sedangkan klasifikasi kemiskinan meliputi Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4. Kawasan dengan kategori perkotaan di Kabupaten Sragen sebesar 48 desa/kelurahan, sedangkan pedesaan sebesar 160 desa/kelurahan.

Secara keseluruhan, mayoritas perkotaan mengalami peningkatan kemiskinan. Perkotaan yang mengalami peningkatan rumah tangga miskin sebesar 44 desa/kelurahan, sedangkan yang mengalami penurunan rumah tangga miskin sebesar 4

desa/kelurahan (Tabel 5). Jumlah keseluruhan peningkatan kemiskinan pada kawasan perkotaan tersebut mencapai 4.420 rumah tangga dengan rata-rata peningkatan kemiskinan sebesar 92,08 rumah tangga dalam satu kawasan. Peningkatan jumlah rumah tangga miskin perkotaan terbesar terjadi di Gemolong, Kecamatan Gemolong sebesar 372 rumah tangga, sedangkan penurunan jumlah rumah tangga miskin perkotaan terbesar di Wonokerso, Kecamatan Kedawung sebesar -24 rumah tangga.

Perubahan kemiskinan tersebut sedikit berbeda dengan yang terjadi di pedesaan. Pedesaan yang mengalami peningkatan rumah tangga miskin sebesar 97 desa/kelurahan, rumah tangga miskin tetap sebesar 1 desa/kelurahan dan rumah tangga miskin berkurang sebesar 62 desa/kelurahan (Tabel 5). Meskipun perbandingan kawasan yang mengalami peningkatan dan penurunan kemiskinan berbeda dengan perkotaan, tetapi secara keseluruhan kemiskinan di pedesaan mengalami peningkatan sebesar 2.523 rumah tangga dengan rata-rata peningkatan kemiskinan dalam satu kawasan sebesar 15,77 rumah tangga. Peningkatan jumlah rumah tangga miskin pedesaan terbesar terjadi di Sidodadi, Kecamatan Masaran sebesar 211 rumah tangga, sedangkan penurunan jumlah rumah tangga miskin pedesaan terbesar di Kedawung, Kecamatan Mondokan sebesar -175 rumah tangga.

Selain itu, peningkatan kemiskinan memiliki kecenderungan terkonsentrasi secara geografis. Peningkatan kemiskinan tinggi dan sedang cenderung terjadi pada kawasan perkotaan dan kawasan yang berdekatan dengan perkotaan (Gambar 5). Kecamatan Sragen, Kecamatan Gemolong dan Kecamatan Masaran merupakan kawasan utama perkotaan di Kabupaten

Sragen. Desa/kelurahan yang berada pada kecamatan-kecamatan tersebut serta desa/kelurahan yang berada pada kawasan

dekat dengannya mengalami peningkatan kemiskinan yang lebih besar.

Tabel 5.
Perubahan Tingkat Kemiskinan menurut Desa-Kota

	Jumlah Desa	Naik	Tetap	Turun	Jumlah	Rata- rata	Min	Max
Perubahan Kategori Sangat Miskin								
Perkotaan	48	43	0	5	1.453	30,27	-45	118
Perdesaan	160	83	1	76	-3.648	-22,80	-282	183
Jumlah	208	126	1	81	-2.195	-10,55	-282	183
Perubahan Kategori Miskin								
Perkotaan	48	29	0	19	182	3,79	-89	87
Perdesaan	160	26	1	133	-7.591	-47,44	-257	52
Jumlah	208	55	1	152	-7.409	-35,62	-257	87
Perubahan Kategori Hampir Miskin								
Perkotaan	48	12	1	35	-625	-13,02	-108	94
Perdesaan	160	48	4	108	-2.030	-12,69	-121	204
Jumlah	208	60	5	143	-2.655	-12,76	-121	204
Perubahan Kategori Rentan Miskin								
Perkotaan	48	48	0	0	3.410	71,04	24	178
Perdesaan	160	160	0	0	15.792	98,70	8	299
Jumlah	208	208	0	0	19.202	92,32	8	299
Perubahan Keseluruhan								
Perkotaan	48	44	0	4	4.420	92,08	-24	372
Perdesaan	160	97	1	62	2.523	15,77	-175	211
Jumlah	208	141	1	66	6.943	33,38	-175	372

Sumber: Hasil analisis, 2022

Perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Sragen sama-sama mengalami peningkatan kemiskinan, tetapi kedua klasifikasi kawasan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Kawasan perkotaan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi terhadap peningkatan rumah tangga miskin. Hal tersebut terlihat berdasarkan proporsi jumlah kawasan perkotaan yang mengalami peningkatan dan penurunan yaitu 44:4, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari setiap 12 perkotaan terdapat 11 perkotaan yang mengalami kemiskinan. Selain itu, jumlah peningkatan rumah tangga miskin di perkotaan pada satu kawasan juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan yaitu 92,08 berbanding 15,77. Hal tersebut

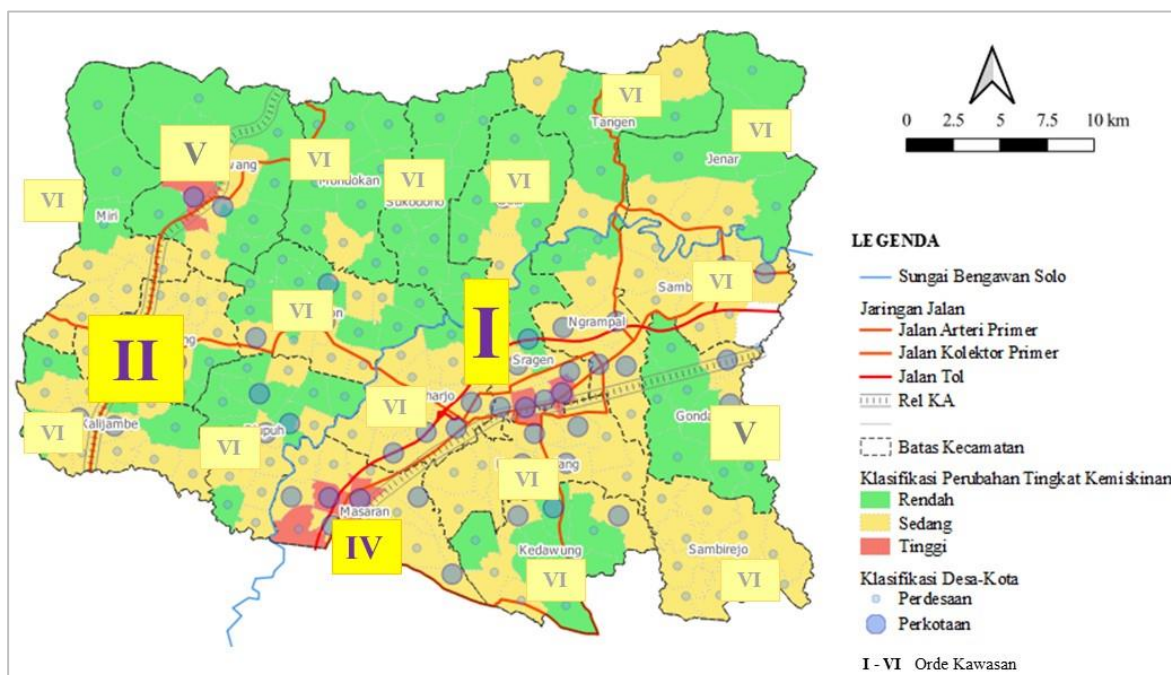
didukung dengan pola persebaran peningkatan kemiskinan yang besar pada kawasan perkotaan dan kawasan yang berdekatan dengannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kawasan perkotaan memiliki kerentanan kemiskinan yang lebih tinggi terhadap guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dibandingkan dengan pedesaan.

Selain itu, perubahan tingkat kemiskinan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan orde wilayah di Kabupaten Sragen. Wilayah dengan orde yang tinggi berada pada area Kecamatan Sragen, Kecamatan Gemolong dan Kecamatan Masaran. Pada ketiga wilayah tersebut, kemiskinan mengalami peningkatan yang tinggi. Hal tersebut terjadi

karena tingginya fasilitas pendukung aktivitas sosial ekonomi yang menggambarkan peran lokasi tersebut sebagai pusat layanan dan tingkat aktivitas non-primer yang lebih tinggi.

Temuan hasil analisis pada penelitian ini menjadi indikasi penguat terhadap beberapa penelitian sebelumnya dalam perspektif yang berbeda. Peningkatan kemiskinan di masa pandemi Covid-19 pada kawasan perkotaan lebih besar di bandingkan dengan kawasan pedesaan. Salah satu hal yang mempunyai kemungkinan menjadi faktor pendorong peningkatan kemiskinan perkotaan tersebut adalah kecenderungan masyarakat perkotaan yang bergantung pada sektor non-pertanian. Sektor non-pertanian merupakan faktor utama pendorong

peningkatan kemiskinan di China selama pandemi Covid-19 (Ren-fu et al., 2020). Selain itu, pola sebaran peningkatan kemiskinan yang terkelompok secara spasial menjadi penguat bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh aspek geografis, baik karena faktor alam maupun faktor sosial-ekonomi (Liu et al., 2021). Namun, peningkatan kemiskinan yang terjadi selama pandemi Covid-19 tidak mengubah secara signifikan pola sebaran angka kemiskinan (Tarigan et al., 2020). Hal tersebut terjadi karena besarnya angka kemiskinan di pedesaan sebelum masa pandemi Covid-19 dan peningkatan kemiskinan di masa pandemi Covid-19 yang juga terjadi di pedesaan meskipun dengan jumlah peningkatan yang tidak sebesar di perkotaan.



Gambar 5. Perubahan Kemiskinan dan Desa-Kota
Sumber: Hasil analisis, 2022

SIMPULAN

Sistem keruangan wilayah tersusun atas perkotaan dan pedesaan. Sebaran perkotaan memiliki kecenderungan terkonsentrasi pada kawasan dengan orde tinggi. Orde wilayah tersebut ditandai dengan adanya kelengkapan berbagai fasilitas pendukung

aktivitas sosial ekonomi yang lebih baik. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat perkotaan memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sektor non-primer yang lebih tinggi. Padahal, sektor non-primer merupakan sektor yang terdampak pandemi Covid-19 lebih besar dibandingkan sektor

primer. Tingginya guncangan ekonomi terhadap masyarakat perkotaan tersebut akhirnya membuat kondisi sosial ekonominya lebih lemah yang ditandai dengan peningkatan angka kemiskinan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, masyarakat perkotaan memiliki kerentanan terhadap kemiskinan yang lebih tinggi.

Meskipun dalam penelitian ini telah mengungkapkan beberapa kajian terkait peningkatan kemiskinan di masa pandemi

Covid-19, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan. Dalam penelitian ini, belum melibatkan aspek sosial-ekonomi masyarakat. Keterlibatan aspek sosial-ekonomi masyarakat dalam skala rumah tangga akan semakin memperkuat hasil analisis. Kekurangan tersebut terjadi karena adanya keterbatasan waktu dan data. Oleh karena itu, kekurangan tersebut dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiodun, J. O. (1967). Urban Hierarchy in a Developing Country Author. *Economic Geography*, 43(4), 347–367.
- Anjani, K. O. P., & Ma'rif, S. (2020). Analisis Tipologi Keterkaitan Interaksi Desa Kota dengan Kemiskinan di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Dan Kota)*, 9(2), 107–122.
- Apriana, M., & Rudiarto, I. (2020). Penentuan Pusat Pelayanan Perkotaan Di Kota Tanjungpinang. *Tunas Geografi*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24114/tgeo.v9i1.17217>
- Arif, M., Nugroho, S. P., Kurniawan, W., Ulinuha, A., Purwandari, E., Surakarta, U. M., Perencanaan, B., & Daerah, P. (2019). Distribusi Spasial Masyarakat Terkategori Miskin dalam Basis Data Terpadu Kabupaten Sragen. *Jurnal Litbang Sukowati*, 2, 97–112.
- Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). (2020). Economic Impact of Covid-19 Outbreak on ASEAN. *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, 1(April), 1–17. https://asean.org/storage/2020/04/ASEAN-Policy-Brief-April-2020_FINAL.pdf
- Bhatta, B. (2010). *Analysis of Urban Growth and Sprawl from Remote Sensing Data*. Springer. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-642-05299-6>
- BPS Kab Sragen. (2021). *Kabupaten Sragen dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen.
- Branch, M. C. (1995). *Perencanaan Kota Komprehensif: Pengantar dan Penjelasan* (Terjemahan). Gajah Mada University Press.
- Chambers, R. (1995). *Poverty and livelihoods : whose reality counts ? 1*.
- Fiorella, K. J., Bageant, E. R., Mojica, L., Obuya, J. A., Ochieng, J., Olela, P., Otuo, P. W., Onyango, H. O., Aura, C. M., & Okronipa, H. (2021). Small-scale fishing households facing COVID-19: The case of Lake Victoria, Kenya. *Fisheries Research*, 237(December 2020), 105856. <https://doi.org/10.1016/j.fishres.2020.105856>
- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Handbook on Poverty + Inequality*. The World Bank.
- IMF. (2020). *REGIONAL ECONOMIC OUTLOOK Navigating the Pandemic* : International Monetary Fund.

- King, L. J. (2020). Central Place Theory. *Web Book of Regional Science*.
- Liu, M., Hu, S., & Ge, Y. (2021). Using multiple linear regression and random forests to identify spatial poverty determinants in rural China. *Spatial Statistics*, 42, 100461. <https://doi.org/10.1016/j.spasta.2020.100461>
- Mahmud, M., & Riley, E. (2021). Household response to an extreme shock : Evidence on the immediate impact of the Covid-19 lockdown on economic outcomes and well-being in rural Uganda. *World Development*, 140(March 2020), 105318. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105318>
- Mirsa, R. (2012). *Elemen Tata Ruang Kota*. GRAHA ILMU.
- Ren-fu, L. U. O., Cheng-fang, L. I. U., Jing-jing, G. A. O., Tian-yi, W., Hua-yong, Z. H. I., & Peng-fei, S. H. I. (2020). Impacts of the COVID-19 pandemic on rural poverty and policy responses in China. *Journal of Integrative Agriculture*, 19(12), 2946–2964. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(20\)63426-8](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63426-8)
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Setyono, J. S. (2007). *Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota*. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Shi, L., Wurm, M., Huang, X., Zhong, T., & Taubenböck, H. (2020). Measuring the spatial hierarchical urban system in China in reference to the Central Place Theory. *Habitat International*, 105(June 2019). <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2020.102264>
- Tan, E. (2014). Human Capital Theory: A Holistic Criticism. *Review of Educational Research*, 8(33), 44. <https://doi.org/https://doi.org/10.3102/0034654314532696>
- Tarigan, H., Sinaga, J. H., & Rachmawati, R. R. (2020). *Dampak pandemi covid-19 terhadap kemiskinan di indonesia*. 3, 457–479.
- Tisdale, H. (1942). The Process of Urbanization. *Social Forces*, 20(2), 311–316. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/sf/20.3.311>
- Townsend, P. (1962). The Meaning of Poverty. *The British Journal of Sociology*, 13(3), 210–227.
- UNDP. (2006). What is poverty? Concepts and Measures. *Poverty in Focus, December 2006*, 1–24.
- World Bank. (2021). *Global Economic Prospects* (Issue January). World Bank Publication.